



# REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN

SEMESTER I TAHUN 2022



KPPN PANGKALAN BUN

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>3</b>
<b>Profil KPPN Pangkalan Bun.....</b>	<b>4</b>
<b>APBN Kita .....</b>	<b>5</b>
<b>Kinerja Realisasi Belanja K/L .....</b>	<b>7</b>
<b>Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....</b>	<b>9</b>
<b>Tantangan Eksekusi Belanja .....</b>	<b>12</b>
<b><i>Warning</i> Semester II .....</b>	<b>17</b>
<b>Mewujudkan Akhir Tahun Yang Lebih Baik.....</b>	<b>17</b>

# Kata Pengantar



Indra Karunia Dewanti  
Kepala KPPN Pangkalan Bun

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya KPPN Pangkalan Bun telah menyusun Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN Periode Semester I Tahun Anggaran 2022.

KPPN selain sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan kewenangan perbendaharaan, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara. KPPN menyalurkan dana APBN kepada satker Kementerian/Lembaga dan Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa di wilayah kerjanya.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran; efisiensi penggunaan anggaran; dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut: reviu belanja; pemantauan dan evaluasi kinerja; pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran; dan telaah makro pelaksanaan anggaran dengan menggunakan aspek pengukuran dan indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran. RPA merupakan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja dan memberikan gambaran terkait kinerja pelaksanaan anggaran beserta analisis tematik terkait capaian kinerja satuan kerja di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun sehingga dapat digunakan sebagai *early warning* pada pelaksanaan anggaran tahun 2022 serta strategi pencegahan terjadinya permasalahan dalam penyaluran dana APBN.

RPA ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* KPPN Pangkalan Bun terkait dengan informasi APBN dan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun pada semester I tahun 2022 untuk dijadikan bahan referensi dan masukan serta bahan evaluasi dan menjadi alat ukur dalam pelaksanaan anggaran periode berikutnya dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun.

Terima kasih kepada seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun dan kepada seluruh pihak yang terlibat atas kerja sama dan kontribusinya sehingga Laporan RPA ini dapat disusun dengan baik.

# KPPN Pangkalan Bun

## A. Profil Umum

KPPN Pangkalan Bun merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun meliputi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Tahun 2022, KPPN Pangkalan Bun mengelola 72 DIPA yang hanya terdiri dari dua kewenangan, yaitu Kantor Daerah (DS) dan Desentralisasi DS) dari 72 satuan kerja (satker) yang tersebar di tiga kabupaten. Kewenangan KD mendominasi satuan kerja di wilayah kerjanya, dari 72 satker, 71 satker dengan kewenangan DS dan satu satker Pengelola Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Dana Desa sebagai penyalur TKDD.

## B. Tugas dan Fungsi dalam Penyaluran Belanja

KPPN Pangkalan Bun, sebagai Kuasa Bun bertugas menyalurkan dana APBN kepada satker Kementerian/Lembaga dan Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa di wilayah kerjanya. Adapun fungsinya dalam penyaluran belanja antara lain:

1. pengujian terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPM);
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. pengelolaan rencana penarikan dana;
5. pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*)

## C. Inisiatif dan Inovasi Layanan

Layanan dalam penyaluran belanja, khususnya SPM sudah secara digital melalui aplikasi SAKTI yang sudah diimplimentasikan ke seluruh satker mulai awal tahun 2022. Adapun berkas fisiknya, dikirimkan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inisiatif layanan adalah Portal KPPN pada tautan [www.portalkppn102.site/](http://www.portalkppn102.site/) , selain sebagai layanan non SPM yang dibutuhkan dalam rangka penyaluran belanja yang tidak diakomodir oleh aplikasi yang tersedia, juga sebagai Buku Tamu bagi stakeholders yang menginginkan layanan di kppn dengan konsep baru, yaitu *fresh office*. Adapun inovasi layanan antara lain Bingka102, OMG102, Arut Pods, Berkobar, Umi *The Series* dan Buletin KIPAS.

## D. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Khusus 2022

Tahun 2022 merupakan masa transisi dari pandemi menuju endemi covid sehingga kebijakannya masih melanjutkan kebijakan sebelumnya. Kebijakan pelaksanaan anggaran tahun 2022 antara lain reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan Peraturan Direktur Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 5/PB/2022 dan penguatan digitalisasi pada pengelolaan Uang Persediaan (UP) dengan meningkatkan transaksi non tunai melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS) dan Digipay, paltform *marketplace* untuk pengadaan barang/jasa sederhana.

# APBN Kita

Tahun 2022 merupakan masa transisi dari pandemi menuju endemi dan APBN 2022 ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian serta memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit di bawah 3% terhadap PDB pada tahun 2023. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari masa relaksasi pelebaran defisit, sehingga harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi.



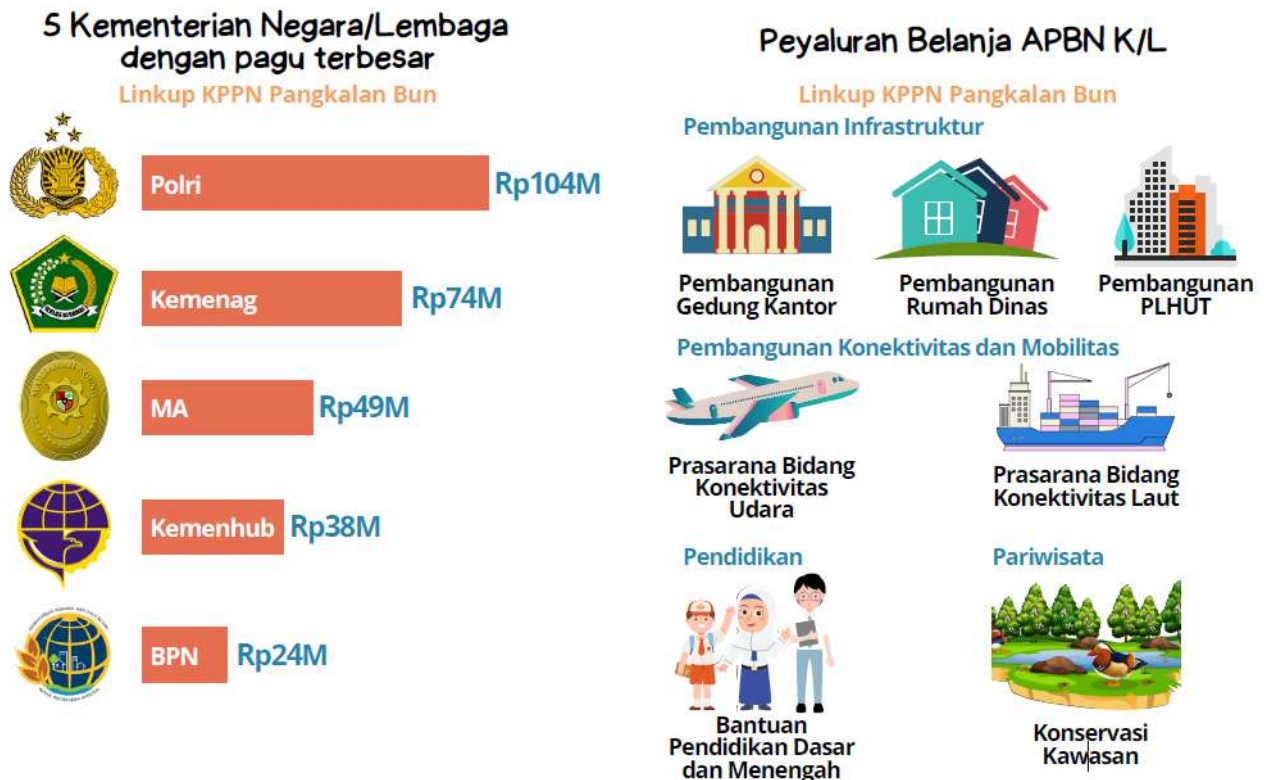
Target penerimaan perpajakan terdiri dari (a) penerimaan perpajakan sebesar Rp1.265 triliun dipengaruhi oleh pulihnya dunia usaha dan reformasi perpajakan; dan (b) penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp245 triliun dipengaruhi oleh penyesuaian tarif cukai serta potensi perluasan basis cukai. Adapun PNBP didukung dari sumber daya alam (SDA), penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan dukungan dari Badan Layanan Umum (BLU), sedangkan hibah terencana pada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mendukung kegiatan pembangunan sistem pedesaan dan perkotaan, keanekaragaman hayati serta penanganan *stunting*.

Tahun 2022, belanja negara masih dirancang untuk dapat responsif sekaligus konsolidatif, mengingat ketentuan batas defisit dengan mengalokasikan untuk belanja K/L sebesar Rp 945,7 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 998,8 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769,6 triliun. Belanja K/L diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif dan produktif; dan mendukung pelaksanaan reformasi struktural, percepatan penyelesaian infrastruktur strategis; serta reformasi birokrasi. Belanja non K/L diarahkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dan mengantisipasi kelanjutan penanganan pandemi covid.

Tahun 2022, KPPN Pangkalan Bun mengelola DIPA senilai Rp 905,9 milyar yang terdiri



dari (a) belanja K/L sebesar Rp 408 milyar (45,01%); dan (b) TKDD sebesar Rp 497,9 milyar (54,9%). Belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 212,9 milyar; belanja barang Rp 145,3 milyar; dan belanja modal sebesar Rp 89,8 milyar yang tersebar pada 71 satker dari 15 K/L. Alokasi anggaran tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 33,7 milyar (3,59%) dari tahun 2021, yaitu Rp 939,6 milyar untuk 71 satker yang terdiri dari 70 satker dari 14 K/L dan satu satker Pengelola Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Dana Desa sebagai penyalur TKDD. Satker baru adalah LOKA POM Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran sebesar 4,2 milyar.



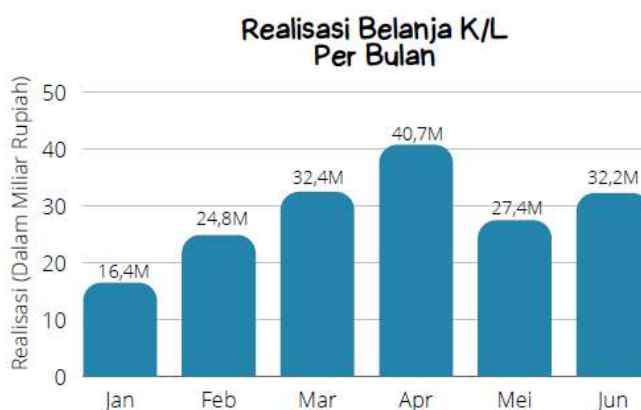
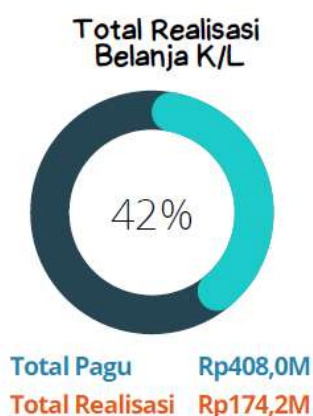
Pada wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun, pemanfaatan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun antara lain pembangunan gedung dan kantor pada satker di beberapa K/L, pembangunan rumah dinas pada satker di beberapa K/L dan pembangunan Pembangunan Layanan Haji dan Umroh terpadu (PLHUT) pada satker Kementerian Agama. Pemanfaatan pembangunan konektivitas dan mobilitas untuk peningkatan prasarana bidang konektivitas udara dan laut pada satker Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan anggaran pendidikan adalah Bantuan Operasional Siswa yang terdapat pada satker Kementerian Agama. Adapun pemanfaatan anggaran pariwisata untuk pengembangan Tanam Nasional Tanjung Puting pada satker Kementerian Kehutanan.

# Kinerja Realisasi Belanja K/L

Penilaian kinerja realisasi belanja K/L disesuaikan dengan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Kategori nilai IKPA diklasifikasikan menjadi 4, yaitu: (1) Sangat Baik dengan nilai di atas 95; (2) Baik dengan nilai di antara 89 sampai dengan 95; (3) Cukup dengan nilai di antara 89 sampai dengan 70; dan (4) Kurang dengan nilai di bawah 70.

Target realisasi belanja K/L tahun 2022 disesuaikan dengan formulasi Indikator Penyerapan Anggaran pada IKPA berdasarkan Peraturan Direktur Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 5/PB/2022. Target realisasi belanja K/L untuk semester I adalah akumulasi dari 50% pagu belanja pegawai, 50% belanja barang dan 40% belanja modal, jadi target realisasi belanja K/L semester I sebesar Rp 199,1 milyar (48,78%).

## Kinerja Realisasi Belanja K/L



Kinerja realisasi belanja K/L di semester I tahun 2022 sebesar 86,10 masuk dalam kategori Cukup, dari 71 satker, terdapat 18 satker dengan kinerja Sangat Baik, 18 satker dengan kinerja Baik; 28 satker dengan kinerja Cukup; dan 7 satker dengan kinerja Kurang. Capaian realisasi belanja K/L di bawah target yang ditetapkan dengan selisih sebesar Rp 24,9 milyar. Capaian yang tidak optimal ini dikarenakan perencanaan belanja pegawai yang berlebihan pada beberapa satker

Kementerian Agama sebagai cadangan pagu minus belanja pegawai satker lainnya di Kementerian Agama, tertundanya proses pengadaan barang/jasa dan sebagian besar pekerjaan mempunyai jangka waktu penyelesaian pada akhir tahun serta adanya blokir dana DIPA sebesar Rp 26,4 milyar (6,5%) pada satker dengan rincian sebagai berikut: belanja pegawai sebesar Rp 3,5 milyar, belanja barang sebesar Rp 5,4 milyar dan belanja modal sebesar Rp 17,5 milyar.

Satker di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pagu besar dan pagu kecil dengan batas alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 milyar, diambil dari median pagu terkecil sebesar Rp 47 milyar dan terbesar sebesar 46,8 milyar.

## Satuan Kerja dengan realisasi tertinggi

### Kategori Pagu Besar



**Lanud Iskandar**  
Total Realisasi **55,07%**



**Kantor Kemenag Kab. Kotawaringin Barat (418784)**  
Total Realisasi **54,72%**



**Lapas Kelas III Sukamara**  
Total Realisasi **53,15%**

### Kategori Pagu Kecil



**Pengadilan Agama Pangkalan Bun (402438)**  
Total Realisasi **61,42%**



**Kantor Kemenag Kab. Lamandau (653805)**  
Total Realisasi **56,12%**



**KPPN Pangkalan Bun**  
Total Realisasi **54,67%**

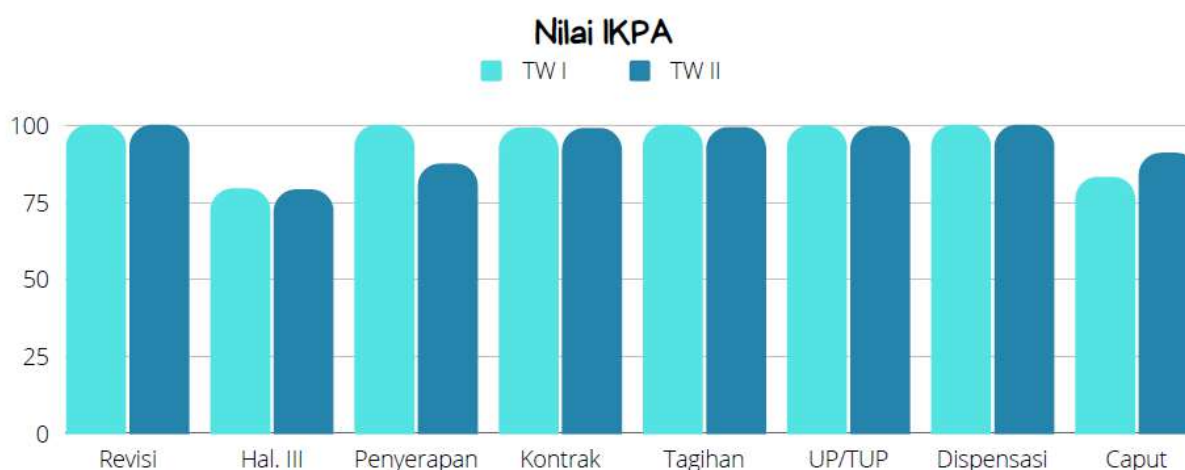


# Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran diukur dengan nilai IKPA. Tahun 2022, IKPA disimplifikasi dari 13 indikator menjadi 8 indikator dengan bobot dan formula yang lebih menantang. 8 indikator IKPA tahun 2022 adalah Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%) dan Capaian Output (25%).

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran KPPN Pangkalan Bun pada semester I tahun 2022 sebesar 92,89 dari target yang ditetapkan yaitu 89 dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian IKPA semester I tahun 2022 di atas target sebesar 3,89. Dari 71 satker, terdapat 23 satker dengan kinerja Sangat Baik; 30 satker dengan kinerja Baik; dan 18 satker dengan kinerja Cukup. Pada semester ini terdapat 3 satker yang mencapai nilai 100, yaitu POLRES Lamandau, Balai Pemasarakatan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dan KPPN Pangkalan Bun.

## Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Nilai IKPA triwulan II mengalami kenaikan 2,01 dibandingkan dengan periode triwulan I dengan nilai 90,88. Pada triwulan I, tidak semua indikator diperhitungkan, indikator Revisi Anggaran dan Penyerapan Anggaran dikecualikan dalam perhitungan IKPA triwulan I. Baru di triwulan II penilaian IKPA menmperehitungkan semua indikator. Meskipun tidak diperhitungkan dalam penilaian IKPA, indikator Revisi Anggaran dan Penyerapan Anggaran tetap terdapat monitoring penilaiannya. Indikator yang mengalami penurunan dari periode triwulan I antara lain: (1) Deviasi Halaman III DIPA mengalami penurunan sebesar 0,29 dibandingkan dengan periode triwulan I dengan nilai 79,34 menjadi 79,05 pada periode triwulan II; (2) Penyerapan Anggaran pada triwulan I mencapai target dengan perhitungan sebagai berikut akumulasi dari 20% pagu belanja pegawai, 15% belanja barang dan 10% belanja modal, jadi target realisasi belanja K/L triwulan I sebesar Rp 69,5 milyar (16,99%) adapun realisasi penyerapan di triwulan I sebesar Rp 73,7 milyar (18,03%), dengan demikian kinerja pada indikator penyerapan anggaran 1,31 di atas target. Indikator; (3) Belanja Kontraktual mengalami penurunan sebesar 0,18 dibandingkan dengan periode triwulan I dengan nilai 99,15 menjadi 98,97 pada periode triwulan II; (4) Penyelesaian Tagihan mengalami penurunan sebesar 0,74 dibandingkan dengan periode triwulan

I dengan nilai 100 menjadi 99,26 pada periode triwulan II; dan (5) Pengelolaan UP dan TUP mengalami penurunan sebesar 0,3 dibandingkan dengan periode triwulan I dengan nilai 99,78 menjadi 99,48 pada periode triwulan II. Indikator yang mengalami peningkatan adalah Capaian Output dengan selisih 7,77 dibandingkan dengan periode triwulan I dengan nilai 83,14 menjadi 90,91 pada periode triwulan II, untuk kondisi normal, akan terus mengalami kenaikan sampai dengan akhir tahun.

### Indikator dengan nilai IKPA terendah

#### Deviasi Hal. III DIPA



#### Penyerapan Anggaran



#### Capaian Output



 Capaian TW I

 Capaian TW II

No		Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)	
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		
1	528150	KANTOR PELAYANAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	665506	POLRES LAMANDAU	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	626178	BALAI PEMASYARAKATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	665491	POLRES SUKAMARA	100	100	100	100	100	99.53	100	100	99.95
5	289796	KANTOR KESVAHBANDARAN	100	100	100	100	100	99.49	100	100	99.95
6	401869	PENGADILAN AGAMA	100	100	100	100	100	99.38	100	100	99.94
7	645955	POLRES KOBAR	100	100	96.76	100	100	100	100	100	99.35
8	289093	STASIUN METEOROLOGI	100	87.84	100	100	100	99.99	100	100	98.78
9	418367	Lapas Kelas III Sukamara	100	90.39	100	94.28	100	100	100	100	98.47
10	289819	KANTOR KESVAHBANDARAN	100	92.47	91.94	100	100	99.97	100	100	97.63
11	653771	KANTOR KEMENTERIAN	100	100	99.64	100	100	100	100	90.17	97.47
12	413880	KANTOR UPBU ISKANDAR	100	89.17	100	100	100	99.88	100	93.95	97.39
13	099134	PENGADILAN NEGERI	100	94.01	100	100	100	99.78	100	89.73	96.81
14	667332	BADAN PUSAT STATISTIK KAB.	100	83.24	89.88	100	100	99.9	100	100	96.29
15	289782	KANTOR KESVAHBANDARAN	100	93.84	84.97	100	100	100	100	98.22	95.93
16	663644	KANTOR PELAYANAN PAJAK	100	85.79	85.28	100	100	99.7	100	100	95.61
17	690469	LOKA POM DI KABUPATEN	100	59.4	95.8	100	100	100	100	98.47	94.72
18	675581	KANTOR PERTANAHAN	100	84.3	90.46	100	100	100	100	92.48	94.64
19	428465	BADAN PUSAT STATISTIK KAB.	100	62.02	95.96	100	100	100	100	89.33	92.73
20	668618	BADAN PUSAT STATISTIK KAB.	100	88.32	89.94	100	100	100	100	82.25	92.38
21	574462	MADRASAH TSANAWIYAH	100	41.06	99.42	71.43	100	92.22	100	97.8	89.8
22	418788	KANTOR KEMENTERIAN	100	80.43	64.92	100	100	99.75	100	93.89	89.47
23	344841	LANUD ISKANDAR	100	39.87	100	100	90	100	100	85.57	89.38
24	238581	BALAI TAMAN NASIONAL	100	50.98	72.26	97	100	97.88	100	100	89.04

No		Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)	
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		
25	406715	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	100	54.11	82.41	100	100	99.91	100	82.51	87.51
26	431380	KANTOR PERTANAHAN KAB.	100	75.97	49.47	100	100	97.8	100	100	87.27
27	681251	MADRASAH TSANAWIYAH	100	62.35	98.91	0	100	100	100	96.77	93.57
28	402438	PENGADILAN AGAMA	100	89.62	100	100	100	0	100	69.09	90.26
29	506333	KANTOR PELAYANAN	100	100	99.8	0	0	100	100	100	99.95
30	418782	KANTOR KEMENTERIAN	100	70.32	78.23	100	50	96.45	100	69.31	79.05
31	411212	KANTOR PENGAWASAN DAN	100	100	93.92	0	0	100	100	100	98.48
32	099247	PENGADILAN NEGERI	100	100	100	0	0	99.75	100	91.24	97.23
33	402437	PENGADILAN AGAMA	100	100	87.93	0	0	100	100	100	96.98
34	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA	100	48.89	21.01	100	100	99.98	100	93.08	77.36
35	653807	KANTOR KEMENTERIAN	100	78.5	95.16	0	0	99.23	100	100	96.01
36	401925	PENGADILAN AGAMA	100	91.36	100	0	0	98.99	100	89.95	95.66
37	681382	MADRASAH ALIYAH NEGERI	100	100	81.78	0	0	98.55	100	100	95.26
38	653779	KANTOR KEMENTERIAN	100	85.45	97.62	0	0	100	100	87.27	93.61
39	574476	MADRASAH TSANAWIYAH	100	85.16	81.98	0	0	99.92	100	98.78	93.25
40	653806	KANTOR KEMENTERIAN	100	84.13	96.8	0	0	100	100	84.05	92.24
41	653781	KANTOR KEMENTERIAN	100	57.01	91.48	0	0	96.11	100	99.99	92.01
42	653800	KANTOR KEMENTERIAN	100	87.02	86.55	0	0	100	100	90	91.89
43	653776	KANTOR KEMENTERIAN	100	35.47	100	0	0	99.57	100	100	91.88
44	007517	KEJAKSAAN NEGERI	100	92.17	77.78	0	0	100	100	94.4	91.72
45	576033	MADRASAH ALIYAH NEGERI	100	87.76	92.68	0	0	100	100	84.19	91.7
46	653805	KANTOR KEMENTERIAN	100	40.84	100	0	0	100	100	95.05	91.06
47	675425	MADRASAH ALIYAH NEGERI	100	56.22	92.73	0	0	100	100	92.2	90.27
48	653803	KANTOR KEMENTERIAN	100	86.01	87.65	0	0	100	100	84.35	90.27
49	418784	KANTOR KEMENTERIAN	100	51.61	100	0	0	99.74	100	85.76	89.47
50	653775	KANTOR KEMENTERIAN	100	46.16	85.49	0	0	98.23	100	100	89.42
51	661605	MADRASAH TSANAWIYAH	100	46.25	90.43	0	0	100	100	94.3	89.11

No			Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
52	658550	KPU KABUPATEN	100	76.27	89	0	0	99.09	100	81.71	88.45
53	667971	KEJAKSAAN NEGERI	100	85.55	80.45	0	0	100	100	81.99	87.68
54	658621	KPU KABUPATEN SUKAMARA	100	66.68	85.32	0	0	98.85	100	86.04	87.66
55	653802	KANTOR KEMENTERIAN	100	73.23	86	0	0	100	100	80.43	87.04
56	419256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	100	63.05	85.18	0	0	99.74	100	84.52	86.81
57	670582	KANTOR PERTANAHAN KAB.	100	90.21	68.78	0	0	100	100	85.99	86.59
58	418783	KANTOR KEMENTERIAN	100	74.43	89.65	0	0	96.81	100	73.61	85.57
59	680078	MADRASAH TSANAWIYAH	100	58.77	71.47	0	0	90.06	100	93.88	84.56
60	658635	KPU KABUPATEN LAMANDAU	100	88.93	83.2	0	0	97.67	100	63.99	82.87
61	418786	KANTOR KEMENTERIAN	100	83.03	88.16	0	0	0	100	99.97	94.18
62	401974	PENGADILAN AGAMA NANGA	100	55.5	100	0	0	0	100	96.12	92.26
63	140831	KANTOR KEMENTERIAN	100	83.89	78.96	0	0	0	100	99.97	91.68
64	653777	KANTOR KEMENTERIAN	100	100	67.76	0	0	0	100	100	90.79
65	653778	KANTOR KEMENTERIAN	100	94.36	81.42	0	0	0	100	85.48	88.7
66	653804	KANTOR KEMENTERIAN	100	94.99	85.26	0	0	0	100	78.21	87.29
67	418785	KANTOR KEMENTERIAN	100	87.49	73.64	0	0	25	100	76.66	75.18
68	667985	KEJAKSAAN NEGERI	100	42.95	91.86	0	0	100	100	49.8	75.15
69	401919	PENGADILAN NEGERI NANGA	100	67.77	38.36	0	0	99.57	100	82.5	75.04
70	402025	PENGADILAN NEGERI NANGA	100	57.32	60.48	0	0	98.46	100	64.8	73.59
71	418787	KANTOR KEMENTERIAN	100	73.03	88.06	0	0	0	100	74.4	83.59

\* Data OMSPAN tanggal 09 Agustus 2022 Jam 10.00 WIB

Meskipun telah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator yang masih belum optimal nilainya, terlebih pada tiga indikator dengan nilai rendah yaitu indikator deviasi Halaman III DIPA terdapat 22 satker dengan nilai kurang, penyerapan anggaran terdapat 7 satker dengan nilai kurang dan capaian output terdapat 5 satker dengan nilai kurang. Diharapkan untuk periode selanjutnya nilai IKPA meningkat hingga mencapai nilai optimal.

## Optimalisasi Nilai IKPA

### Deviasi Hal. III DIPA

- Menyusun Rencana Kerja dalam satu tahun berkoordinasi dengan seksi teknis
- Mereviu rencana kerja secara periodik
- Menyelaraskan RPD Hal. III DIPA dengan target penyerapan
- Melakukan revisi Hal. III DIPA sebelum batas akhir *cut off*

### Penyerapan Anggaran

- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun
- Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang dapat segera dilakukan
- Penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan RPD yang telah disusun

### Capaian Output

- Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis
- Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (PCRO) dan capaian (RVRO)
- Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler

# Tantangan Eksekusi Belanja

## A. Penyesuaian Rencana Belanja

### 1. Blokir

#### a. Akar Permasalahan

- 1) Proses penghapusan blokir memerlukan proses dengan waktu penyelesaian yang tidak jelas di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
- 2) Pemblokiran dari eselon I, untuk alokasi anggaran berlebih untuk kepentingan dana cadangan;
- 3) Kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) hingga akhir semester I masih berlangsung;

#### b. Rekomendasi

Satker dihimbau untuk:

- 1) mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat catatan dalam DIPA yang mengakibatkan pemblokiran alokasi anggaran dan segera menyelesaikannya di awal triwulan III;
- 2) melakukan percepatan (akselerasi) belanja sebelum diterapkannya AA;
- 3) apabila sudah terkena pemblokiran akibat AA, agar mengoptimalkan realisasi belanja pada kegiatan yang memiliki alokasi anggaran terbuka;

### 2. Pagu Minus

#### a. Akar Permasalahan

##### 1) Belanja Pegawai

Perencanaan kebutuhan belanja pegawai pada RKAK/L tidak mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: jumlah pegawai, rencana perekrutan pegawai baru, kebijakan mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan jumlah pegawai yang akan pensiun;

##### 2) Belanja non Pegawai

Kurangnya koordinasi internal satker maupun eksternal dengan eselon I melalui kantor wilayah berkaitan dengan pelaksanaan revisi DIPA. Informasi realisasi anggaran satker tidak secara detil dan *up to date* menyebabkan revisi atas data yang tidak valid tersebut menyebabkan terjadinya pagu minus;

#### b. Rekomendasi

##### 1) Belanja Pegawai

Satker dihimbau untuk melakukan perhitungan kembali terhadap potensi realisasi akhir sampai dengan akhir tahun dan melakukan revisi pagu belanja pegawai disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

##### 2) Belanja non Pegawai

Satker dihimbau untuk melakukan penyesuaian dengan mengajukan ralat/koreksi SPM/SP2D yang sudah ada realisasinya dan apabila memungkinkan melakukan revisi DIPA sesuai dengan kewenangannya;

### 3. Deviasi Halaman III DIPA



- a. Akar Permasalahan
  - 1) rendahnya *awareness* satuan kerja pada Perencanaan Halaman III DIPA;
  - 2) revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran yang membutuhkan waktu relatif lama, sehingga satuan kerja tidak dapat melakukan pemutakhiran data Halaman III DIPA pada triwulan II meskipun terdapat perpanjangan waktu;
  - 3) revisi dari eselon I yang mengakibatkan perubahan otomatis terhadap Halaman III DIPA yang sudah dilakukan pemutakhiran data, sedangkan periode pemutakhiran data Halaman III DIPA hanya pada 10 hari kerja di awal triwulan;
  - 4) pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana;
- b. Rekomendasi
  - 1) KPPN akan terus melakukan edukasi dan menajamkan strategi komunikasi dalam rangka peningkatan *awareness* satuan kerja pada Perencanaan Halaman III DIPA;
  - 2) Satker dihimbau untuk:
    - a) menyusun Rencana Kerja Tahunan beserta anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan sehingga dapat dipergunakan sebagai Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA;
    - b) apabila tidak ada Rencana Kerja Tahunan, bisa menggunakan realisasi anggaran tahun yang lalu sebagai benchmark dalam penyusunan RPD Bulanan di tahun berjalan dengan increase 3% atau mempertimbangkan besaran pagu anggaran karena batas toleransi Deviasi Halaman III DIPA adalah 5%;
    - c) mereviu rencana kerja secara periodik dan melakukan pemutakhiran data Halaman III sebelum batas cut off (10 hari kerja di awal triwulan);
    - d) menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target realisasi belanja;
    - e) mengajukan tagihan sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan, apabila

#### 4. Revisi Anggaran

- a. Akar Permasalahan
  - 1) kurangnya koordinasi dengan internal pejabat perbendaharaan yang mengakibatkan informasi data realisasi anggaran dengan rencana pelaksanaan kegiatan di satker tidak *up to date* sehingga pada saat kebijakan eselon I mengajukan revisi mengakibatkan kegiatan tidak bisa dieksekusi dikarenakan telah terjadi perubahan alokasi yang menyebabkan dana tidak cukup;
  - 2) kurangnya koordinasi dengan unit vertikalnya (eselon I) terkait dengan pengajuan revisi sehingga menyebabkan tidak optimal di satker sehingga masih diperlukan revisi kembali;
  - 3) Waktu penyelesaian proses revisi di DJA yang tidak pasti dan seringnya memerlukan waktu yang lama menyebabkan satker tidak bisa melakukan revisi untuk disesuaikan dengan rencana kegiatannya;
- b. Rekomendasi

Satker dihimbau untuk:

  - 1) melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan) dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan



penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;

- 2) meminimalisir revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan *trajectory* penyerapan anggaran berubah;

## B. Pengadaan Barang dan Jasa

### 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

#### a. Akar Masalah

- 1) tidak ada pejabat pengadaan;
- 2) minimnya pemahaman pejabat pengadaan tentang teknis pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan;

#### b. Rekomendasi

- 1) KPPN, secara rutin memberikan informasi kepada satker terkait pelatihan kompetensi calon/pejabat pengadaan ;
- 2) Satker dihimbau untuk:
  - a) menetapkan pejabat pengadaan pada awal tahun anggaran seperti halnya penunjukan pejabat perbendaharaan;
  - b) menugaskan pejabat/pegawai untuk mengikuti pelatihan kompetensi calon/pejabat perbendaharaan;
  - c) menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/ petunjuk operasional dalam pengadaan barang dan jasa;

### 2. Prasyarat Kegiatan

#### a. Akar Masalah

- 1) adanya blokir pada alokasi anggaran kegiatan yang belum diselesaikan dikarenakan adanya catatan maupun AA;
- 2) tidak adanya perencanaan dan persiapan yang memadai;
- 3) terdapat pengadaan barang dan jasa di bawah nilai kapitasi;

#### b. Rekomendasi

Satker dihimbau untuk:

- 1) mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan segera menyelesaikan proses penghapusan blokir di awal triwulan III;
- 2) melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang terbuka secara proporsional;
- 3) melakukan identifikasi kegiatan yang memerlukan PBJ dan menyusun perencanaan pelaksanaan program/kegiatan/proyek serta mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai prasyarat kegiatan;
- 4) melakukan percepatan penyelesaian dokumen pendukung, antara lain perijinan yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program/kegiatan;
- 5) melakukan perubahan akun terlebih dahulu untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di bawah kapitasi;

### 3. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

#### a. Akar Masalah

- 1) keterlambatan dalam proses pengadaan, kegagalan lelang, dan ketiadaan barang dalam sistem e-katalog LKPP;

- 2) keterbatasan penyedia barang dan jasa yang tersedia sehingga harus memilih dari luar kota atau provinsi;
- b. Rekomendasi  
Satker dihimbau untuk:
  - 1) menetapkan pejabat pengadaan secepatnya, idealnya sudah ditetapkan setelah DIPA diterima;
  - 2) mengupayakan proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan segera, karena pengadaan barang dan jasa membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup besar dan untuk memitigasi risiko terjadinya kegagalan lelang dan ketiadaan barang dalam e-katalog LKPP sehingga dapat menyiapkan alternatif sebagai antisipasinya;

### C. Eksekusi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

#### 1. Belanja Kontraktual

##### a. Akar Permasalahan

- 1) keterlambatan pendaftaran kontrak;

##### b. Rekomendasi

Satker dihimbau untuk:

- 1) melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam pemenuhan dokumen pendukung kontrak pengadaan barang dan jasa;
- 2) memetakan administrasi dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk pendaftaran kontrak yang sudah disepakati ke kppn secara tepat waktu (5 hari kerja);

#### 2. Penyelesaian Tagihan

##### a. Akar Permasalahan

- 1) keterlambatan penyampaian tagihan;
- 2) perubahan tarif pajak

##### b. Rekomendasi

Satker dihimbau untuk:

- 1) meningkatkan koordinasi internal dalam memetakan administrasi dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk persyaratan pengajuan tagihan;
- 2) segera melakukan perubahan/addendum kontrak yang terdampak dari perubahan tarif pajak dan segera dilakukan pendaftaran ke kppn;
- 3) segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang sudah selesai pekerjaannya (termasuk pekerjaan termin);
- 4) memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih;
- 5) lebih teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP;

### D. Belanja Berkarakter

#### 1. Akar Masalah

##### a. Satker Kementerian Agama

- 1) Dana BOS masih terdapat catatan pada DIPA (blokir);

##### b. Satker Kementerian ATR/BPN

- 1) Peta Bidang Tanah Pihak Ketiga, Redistribusi tanah, PTSL. Kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan mengalami kendala di lapangan saat pelaksanaan sehingga belum dapat diselesaikan dan diproses pencairannya;
  - 2) prasyarat kegiatan menjadi kendala dalam melakukan pencairan dana karena untuk dapat mencairkan tahapan pertama kegiatan (misal kegiatan penyuluhan), tahapan kedua (kegiatan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah) dan tahapan ketiga (pengukuran bidang tanah) harus telah terlaksana terlebih dahulu baru bisa mencairkan tahapan pertama. Prasyarat terdapat pada juknis kegiatan yang dibuat oleh kantor pusat. Menurut informasi yang didapat, prasyarat dibuat supaya terdapat kepastian bahwa kegiatan tersebut pasti akan diselesaikan dan tidak berhenti di tengah jalan (hanya dilaksanakan penyuluhan/tahapan pertama saja);
  - 3) terdapat anggaran sumber dana PNBPN untuk pelayanan pertanahan yang tidak bisa dicairkan karena saat ini sudah beralih ke layanan elektronik;
  - 4) kegiatan sertifikasi tanah melalui redistribusi tanah sulit direalisasikan karena sulit mendapatkan subyek dan obyek yang sesuai dengan persyaratan;
  - 5) kegiatan digitalisasi dan validasi data pertanahan yang bersumber dana PHLN saat ini masih dalam proses penyiapan dokumen pendukung;
- c. Satker KPU RI
- 1) pengeluaran anggaran yang harus sesuai dengan juknis dari KPU RI membuat penyerapan anggaran kurang maksimal apabila dibandingkan dengan satker lain non penyelenggara pemilu;
  - 2) adanya belanja kegiatan tahapan kepemiluan yang belum bisa dilaksanakan sepenuhnya mengingat warning dalam pelaksanaannya oleh eselon I;
2. Rekomendasi
- Satker dihimbau untuk:
- a. memetakan administrasi dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk pencairan belanja sesuai aktivitas belanja;
  - b. mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan secara intens melakukan koordinasi dengan eselon 1 terkait penghapusan catatan (blokir) DIPA.

# Warning Semester II

## Mewujudkan Akhir Tahun Yang Lebih Baik

### A. Target Realisasi Belanja

Target realisasi belanja triwulan III adalah akumulasi dari 75% pagu belanja pegawai, 70% belanja barang dan 70% belanja modal, jadi target realisasi belanja K/L semester I sebesar Rp 290,6 milyar (72,67%) dan target triwulan IV adalah akumulasi dari 95% pagu belanja pegawai, 90% belanja barang dan 90% belanja modal, jadi target realisasi belanja K/L semester I sebesar Rp 370,6 milyar (92,67%). Target di semester II dapat dicapai dengan ketentuan alokasi anggaran yang terdapat catatan (blokir) sudah diselesaikan sehingga satker dapat melaksanakan kegiatan yang tertunda dikarenakan adanya blokir tersebut.

### B. Target Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Target capaian kinerja adalah 89 baik dari triwulan I sampai dengan IV. Dengan mempertimbangkan nilai indikator capaian output yang memiliki bobot tertinggi (25%) dan setiap bulannya nilainya terus meningkat maka target 89 dapat dicapai sampai pada triwulan IV. Selain itu, akan terus dilakukan koordinasi baik dengan satker maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mengoptimalkan nilai IKPA sampai triwulan IV.

### C. Permasalahan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan semester I Blokir yang sampai dengan awal triwulan III belum dapat diselesaikan, diprediksi permasalahan yang mungkin akan terjadi pada semester II antara lain;

1. Deviasi Halaman III DIPA;
2. Pagu Minus;
3. Belanja Kontraktual
4. Penyelesaian Tagihan;
5. Pengelolaan UP dan TUP dikarenakan pergantian kartu debit *Virtual Account* (VA)
6. Permasalahan pada aplikasi SAKTI

### D. Strategi

Rencana tindak lanjut sebagai rekomendasi terhadap permasalahan pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Surat pemberitahuan kepada satker terkait peraturan dan/atau aplikasi baru dan kinerja pelaksanaan anggaran melalui penilaian IKPA;
2. Penguatan komunikasi dengan satker melalui media sosial KPPN Pangkalan Bun seperti youtube, instagram, podcast, OMG (One Minute Guidance), WAG, dan Bingka102;
3. Sosialisasi, Bimtek, dan/atau FGD dalam rangka edukasi kepada satker
4. Monitoring dan evaluasi kepada satker;
5. *Site Visit Stakeholders* kepada satker yang terindikasi mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran dan perlambatan penyerapan anggaran; serta
6. Koordinasi dengan bank Himbara mengenai permasalahan dan kendala terkait dengan VA, KKP maupun Digipay

Adapun rencana strategis langkah-langkah asistensi/pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satker, antara lain:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Target
1.	DKO	Bulanan	Pejabat KPPN untuk membahas MR dan permasalahan yang ada
2.	OMG	Februari s.d Desember	Seluruh satker
3.	Podcast	Maret s.d Desember	Seluruh satker
4.	Monitoring dan Evaluasi	Triwulan	Seluruh satker
5.	<i>One on One Meeting</i>	September dan November	<i>Clustering</i> satker berdasarkan mitigasi risiko mengenai kesamaan pemasalahan dan kendala dalam pelaksanaan anggaran
6.	Sosialisasi	Jika ada peraturan baru	Seluruh satker
7.	Bimtek	Jika ada aplikasi baru	Seluruh satker
8.	<i>Site Visit Stakeholders</i>	April, November	<i>Clustering</i> satker berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
9.	LLAT	September	Seluruh satker
10	Penyerahan DIPA 2023	Desember	Seluruh satker



Penyusun:

SEKSI PENCAIRAN DANA DAN MANAJEMEN SATKER

Dwi Anggani

Muhammad Wildan Mahardika

Devita Rosdiana